

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI JASA ANGKUTAN LAUT, SUNGAI DAN PENYEBRANGAN DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Dalam Memenuhi Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Diajukan Oleh :

**RIZMA DEVI FEBRIANI
NIM. 07011281823108**

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Indralaya, Ogan Ilir
JULI 2022**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI JASA
ANGKUTAN LAUT, SUNGAI DAN PENYEBRANGAN DI
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG”**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**

Oleh :

Rizma Devi Febriani

07011281823108

Pembimbing I

1. Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si

NIP. 196311061990031001

Tanda Tangan



Tanggal

24-6-22

Pembimbing II

2. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si

NIP. 197705122003121003



16/6

Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik,



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

Nip. 196911101994011001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI JASA ANGKUTAN LAUT,
SUNGAI DAN PENYEBRANGAN DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA
PALEMBANG**

Skripsi

Oleh :

Rizma Devi Febriani
07011281823108

**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 30 Juni 2022**

Pembimbing :

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri M.Si
NIP. 196311061990031001

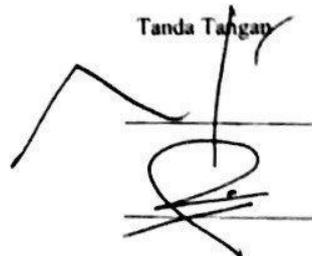
Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

Penguji :

Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

Dr. Alamsyah, M.Si
NIP. 197808182009121003

Tanda Tangan



Tanda Tangan



Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



Prof. Dr. Alfuri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik,



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizma Devi Febriani
NIM : 07011281823108
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 20 Februari 2001
Program Studi/ Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Angkutan Laut, Sungai dan Penyebrangan di Dinas Perhubungan Kota Palembang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, Juni 2022
Yang membuat pernyataan



Rizma Devi Febriani

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Lakukanlah hal yang kamu suka selama itu baik dan tidak merugikan siapapun”

(Rizma Devi Febriani)

Skripsi ini Saya Persembahkan Kepada:

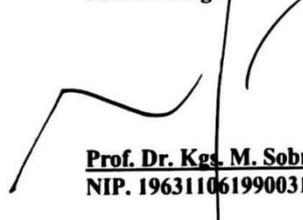
- 1. Kedua Orang Tua Saya, Papa dan Mama Tercinta**
- 2. Kedua Adikku Tersayang**
- 3. Sahabatku Terkasih**
- 4. Almamater Kebanggaan**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Angkutan Laut, Sungai dan Penyebrangan di Dinas Perhubungan Kota Palembang", Penelitian dilatarbelakangi oleh masih belum tercapainya target retribusi yang ingin dicapai. Adapun permasalahan dan kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target retribusi ini bahwa masih belum ada dasar hukum yang kuat untuk pemungutan retribusi jasa rambu dan pengawalan tongkang batubara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Angkutan Laut, Sungai dan Penyebrangan di Dinas Perhubungan Kota Palembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Van Horn dan Van Meter berdasarkan enam variabel yaitu: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait, sikap para pelaksana, dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum tercapainya target realisasi retribusi yang ingin dicapai, masih kurangnya sumber daya manusia yang memadai dan fasilitas yang masih perlu perbaikan. Saran yang direkomendasikan dalam penelitian ini adalah meningkatkan penerimaan retribusi jasa angkutan laut, sungai dan penyeberangan dengan memaksimalkan seluruh komponen yang ada sesuai kemampuan tanpa menurunkan kualitas retribusi di Dinas Perhubungan Kota Palembang dan melakukan pengawasan dan pengendalian di lapangan dalam penerimaan tarif retribusi ASDP sehingga dengan maksimal dapat melihat perkembangan tarif retribusi yang signifikan dari tahun ke tahun.

Kata Kunci: Implementasi, Retribusi, DISHUB, ASDP

Pembimbing I



Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Pembimbing II



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

Indralaya, Juli 2022

**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**



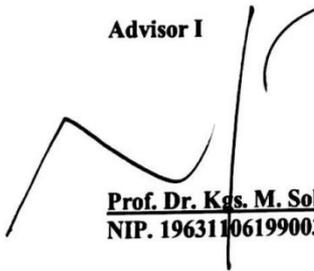
Dr. K. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRAK

This study is entitled "The Implementation of Retribution Policy for Sea, River and Crossing Transportation Services at the Palembang City Transportation Service". The research is motivated by the fact that the retribution target to be achieved has not been achieved. As for the problems and obstacles that caused the retribution target not to be achieved, there is still no strong legal basis for collecting levies for signage services and escorting coal barges. This study aims to analyze the implementation of the sea, river and ferry service levy policy implementation at the Palembang City Transportation Service. The method that is used in this research is a qualitative descriptive. This study uses the Implementation Theory of Van Horn and Van Meter based on six variables: standards and policy objectives, resources, characteristics of implementing organizations, communication between related organizations, attitudes of implementers, and social, economic, and political environment. The results of this study indicate that it has not been implemented properly, it can be seen that this policy has not yet achieved the target of retribution realization to be achieved, there is still a lack of adequate human resources and facilities that still need improvement. Suggestions recommended in this study are to increase the acceptance of retribution for sea, river and ferry services by maximizing all existing components according to ability without reducing the quality of levies at the Palembang City Transportation Service and conducting supervision and control in the field in receiving ASDP retribution rates so that maximally it can see the significant development of retribution rates from year to year.

Keyword: Implementation, Retribution, DISHUB, ASDP

Advisor I



Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Advisor II



Sofvan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

Indralaya, July 2022

**Head of the Department of Public Administration
faculty of Social Science and Political Science
Sriwijaya University**



Dr. M. Nur Budivanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul : **"Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Angkutan Laut, Sungai dan Penyebrangan di Dinas Perhubungan Kota Palembang"**.

Selama proses penyusunan Skripsi ini, penulis telah mendapatkan bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan penyelesaian Skripsi ini. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Keluarga saya, khususnya kedua orang tua saya, Ahmad Rizal dan Irmawati yang selalu memberikan semangat dan dukungan, baik itu doa, moril maupun finansial selama dalam penyusunan skripsi ini. Adik saya, Asyifa Nur Yarani dan Pranedy Adli Obama yang telah memberikan semangat dan dukungan dari segala hal.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.S.C.E. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik FISIP Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si, selaku Pembimbing 1 dan sekaligus Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu dan pikiran demi memberikan masukan yang baik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si, selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan masukan yang baik dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap Dosen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan

8. Segenap Karyawan FISIP Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan bantuan dalam kelengkapan akademik dalam proses perkuliahan.
9. Bapak H. Aprizal Hasyim, S.Sos., MM selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
10. Seluruh informan penelitian pada Dinas Perhubungan Kota Palembang khususnya Pegawai Bagian Perencanaan & Pelaporan Dan Pegawai Bidang Jasa Angkutan Laut, Sungai Dan Penyebrangan.
11. Kepada Ade Rachmadil Putra sebagai partner spesial saya, yang telah menjadi partner dalam segala hal baik, yang mendukung, memberikan semangat dan mendoakan saya untuk terus maju dan jangan menyerah dalam segala hal, untuk meraih apa yang menjadi impian saya.
12. Teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Publik angkatan 2018.
13. Seluruh pihak yang telah terlibat dalam membentuk kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Indralaya, 30 Juli 2022

Penulis



Rizma Devi Febriani

NIM. 07011281823108

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI | i |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN | ix |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| 1. Manfaat Teoritis | 7 |
| 2. Manfaat Praktis | 7 |
| DAFTAR PUSTAKA | 8 |

DAFTAR TABEL

HAL

| | |
|--|---|
| Tabel 1 Data Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Angkutan Laut, Sungai dan Penyebrangan pada Dinas Perhubungan Kota Palembang Tahun 2018-2020..... | 4 |
| Tabel 2 Data Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Retribusi Jasa Angkutan Laut, Sungai dan Penyebrangan pada Dinas Perhubungan Kota Palembang Tahun 2020..... | 5 |
| Tabel 3 Data Prasarana Angkutan Sungai Bidang Jasa Angkutan Laut, Sungai dan Penyebrangan pada Dinas Perhubungan Kota Palembang Tahun 2020..... | 5 |

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|--------|---|
| ASDP | : Jasa Angkutan Laut, Sungai dan Penyebrangan |
| DISHUB | : Dinas Perhubungan |
| SOP | : Standar Operasional Prosedur |
| PNS | : Pegawai Negeri Sipil |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

SDGs atau agenda kelanjutan ialah proposal pembangunan PBB ialah kelanjutan (MDGs). Tujuan Proposal untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi negara-negara di dunia, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Tujuan SDGs setelah menyelesaikan 15 tahun pembangunan global "(MDGs)". PBB anggotanya yaitu negara-negara yang ada di dunia mengakui pencapaian 15 tahun terakhir karena berbagai kesulitan dan tantangan, banyak yang belum tercapai untuk menyelesaikan tujuan pembangunan global yang ingin dicapai. Salah satu tujuan yang ingin diselesaikan SDGs menekankan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Indonesia merupakan negara berkembang dan tentunya memiliki biaya yang sangat tinggi untuk berkembang. Pembangunan adalah tindakan yang selalu melakukan perbaikan agar dapat mencapai tujuan. Tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memaksimalkan kenyamanan dalam bermasyarakat sehingga aktivitas kita dapat dilakukan dengan nyaman. Pembangunan ekonomi adalah perkembangan meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Pencapaian tujuan-tujuan ini memerlukan penggunaan semua kemampuan guna menumbuhkan pertumbuhan secara keseluruhan.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata dengan mengembangkan sistem hubungan pusat dan masyarakat. Untuk mendamaikan Pembangunan menyeluruh, lahirilah UU Otonomi Daerah memberdayakan

pemerintah secara langsung serta lebih leluasa mengelola, menemukan kemampuan yang dimilikinya.

Desentralisasi ialah memberi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dimulai dari kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pendanaan dalam rangka demokrasi. Otonomi daerah, di sisi lain, adalah kewenangan daerah yang mengelola anggarannya sendiri dalam kerangka desentralisasi (E. Sopbaba et al., 2012). Agar dapat merespon dengan cepat tuntutan dan permasalahan yang muncul di masyarakat. Potensi daya yang ada di daerahnya dan menjadi lebih berdaya memperhatikan keragaman (Chasanah & Muchsin, 2020).

Pemerintah daerah melaksanakan otonomi daerah memiliki kreativitas untuk pendapatan mendanai belanja yang unik. Setiap daerah memiliki serta mengendalikan anggarannya pemerintah. Pemerintah mengontrol memungut pajak (Adelin & Pudehokang, 2011). Surchage ialah memberikan potensi dan masukan terbesar bagi keuangan daerah. Salah satu sumber pendapatan negara adalah royalti. Tidak seperti pajak, perpajakan umumnya secara langsung terkait dengan quid proquares. Artinya, pajak akan dibayar langsung dari pembalasan yang dibayarkan di Darwin 2010: 165 (Brotodiharjo, 1993: 7).

Retribusi adalah pelayanan khusus secara individu karena adanya negara dari penduduknya (Siahaan, 2010). Pengertian Pemungutan Pajak Pemungutan pajak adalah pemungutan pajak yang memperhitungkan pemberian pelayanan (Lestari et al., 2015). Pajak ialah sumber pendapatan daerah atas pelayanan dan izin yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah. Pajak daerah pada dasarnya dikelola secara mandiri oleh masing-masing daerah misalnya pajak atas jasa angkutan laut, sungai, dan lintas di Palembang.

Palembang terkenal dengan salah satu simbolnya, Sungai Musi. Sungai Musi merupakan sungai yang banyak dilalui kapal-kapal yang tunduk pada kewajiban yang termasuk dalam retribusi merupakan pendukung yang mendorong perkembangan Kota Palembang yang berperan penting dalam pelayanan transportasi. Salah satu daerah pelayanan transportasi di Palembang adalah daerah pelayanan transportasi laut, sungai dan penyebrangan.

Jasa angkutan laut, sungai dan penyeberangan, yaitu pengangkutan menggunakan kapal sungai, penyebrangan serta laut untuk membawa hewan atau barang serta penumpang. Besarnya tarif Retribusi ASDP adalah salah satu yang terkait dengan tiket masuk penumpang, dan pengiriman dan pengambilan berdasarkan Peraturan Daerah 17 Tahun 2011 adalah Rp 2.500,- dewasa per orang sekali masuk, Rp 1.500,- untuk anak per orang sekali masuk. Tahun 2018-2020 memiliki data mengenai pengaruh Retribusi ASDP pada Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang. Target Retribusi ASDP pada tahun 2018-2020 yaitu:

Tabel 1
Data Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Angkutan Laut, Sungai dan Penyeberangan pada Dinas Perhubungan Kota Palembang Tahun 2018-2020

| Tahun | Target | Realisasi | % |
|--------------|-------------------------|-----------------------|----------|
| 2018 | Rp. 37.685.248.010,13,- | Rp. 4.265.970.074,7,- | 11,32 |
| 2019 | Rp. 37.685.000.000,- | Rp. 5.241.983.500,- | 13,91 |
| 2020 | Rp. 5.000.000.000,- | Rp. 4.585.363.276,- | 91,71 |

Sumber : Laporan Tahunan Tahun 2020 Dinas Perhubungan Kota Palembang

Retribusi Jasa Angkutan Laut, Sungai dan Penyebrangan, terlihat konsistensi peningkatan kinerja pengelolaan PAD untuk Retribusi Jasa Laut dan ASDP dari Tahun 2018 s.d, 2020 Secara keseluruhan, persentase capaian kinerja tahun 2020 sebesar 113,24% mengalami kenaikan terlihat dari persentase dibanding tahun 2019 sebesar 26,73% dan tahun 2018 sebesar 25,11%. Namun secara nominal, terdapat penurunan pada Tahun 2020 sebesar Rp.12.139.466.166,-

dibanding tahun 2019 Rp.14.782.236.022 di karenakan pada tahun 2020 terjadi pengurangan target.

Tabel 2
Data Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Retribusi Jasa Angkutan Laut, Sungai dan Penyeberangan pada Dinas Perhubungan Kota Palembang Tahun 2020

| No | Uraian | Tahun 2020 | | |
|-----|---|---------------|---------------|-------|
| | | Target | Realisasi | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | UPTD. Tangga Buntung | 5.000.000.000 | 23.045.000,- | 91,71 |
| 2. | UPTD. Dermaga 16 Ilir | | 126.895.000,- | |
| 3. | UPTD. Dermaga Sei Lais | | 52.940.000,- | |
| 4. | UPTD. Dermaga Jakabaring | | 19.088.000,- | |
| 5. | UPTD. Pelabuhan 35 Ilir | | 5.240.000,- | |
| 6. | UPTD. 7 Ulu | | - | |
| 7. | Sertifikat Pengujian Kendaraan diatas Air | | 4.001.000,- | |
| 8. | Sewa Kapal | | 5.550.000,- | |
| 9. | Setoran PT.Pelindo II (PH.III) | | 1.350.000,- | |
| 10. | Sewa Lahan/ Ruangan | | 4.328.731.776 | |
| 11. | Sewa Perairan Pelabuhan | | 12.505.000,- | |
| | JUMLAH | 5.000.000.000 | 4.585.363.276 | 91,71 |

Sumber : Laporan Tahunan Tahun 2020 Dinas Perhubungan Kota Palembang

Memperhatikan Tabel Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Retribusi Jasa ASDP, bahwa realisasi retribusi Jasa ASDP mencapai angka 91,71% dari target yang ditetapkan untuk Tahun 2020. Angka persentase kinerja ini menunjukkan bahwa capaian kinerja pengelolaan retribusi Jasa ASDP masih kurang 8,29% target yang ditetapkan.

Tabel 3
Prasarana Angkutan Sungai bidang Angkutan Laut, Sungai dan Penyeberangan pada Dinas Perhubungan Kota Palembang Tahun 2020

| Prasarana Angkutan Sungai | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|----|-------------------------|-----|------------------------------|
| 1. | Dermaga Sungai Lais | 6. | Dermaga Kampung Kapiten | 11. | Dermaga Mesjid KI Merogan |
| 2. | Dermaga 16 Ilir | 7. | Dermaga Ampera 7 Ulu | 12. | Dermaga Jakabaring |
| 3. | Dermaga Benteng Kuto Besak | 8. | Dermaga Sekanak | 13. | Dermaga Pertamina Ogan Plaju |

| | | | | | |
|----|-----------------------------|-----|------------------------|-----|--------------------------------|
| 4. | Dermaga Ampera 16 Ilir | 9. | Dermaga 10 Ulu | 14. | Dermaga Pertamina Bagus Kuning |
| 5. | Dermaga Mesjid Lawang Kidul | 10. | Dermaga Tangga Buntung | | |

Sumber: Dishub Dalam Angka 2020

UPTD Dermaga ditunjuk guna melakukan retribusi ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. UPTD Dermaga memiliki tugas ialah melakukan aktivitas operasi Dermaga, bina pengguna jasa, atur waktu berangkat kapal, pantau biaya kapal, laksanakan pengambilan biaya retribusi. Adapun permasalahan dan kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target retribusi Jasa laut dan ASDP diantaranya sebagai berikut, belum ada dasar hukum yang kuat untuk pemungutan retribusi jasa rambu dan pengawalan tongkang batubara, Perwali No.35 Tahun 2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang jasa rambu dan wajib pengawalan bagi kapal/ tongkang yang melintas di kawasan Sungai Musi belum cukup kuat untuk memungut retribusi Rp.4.000,-/ton dengan target 35 Milyar, dan sudah diusulkan Revisi Peraturan Daerah Kota Palembang No. 14 Tahun 2011 masih dalam pembahasan banleg VII DPRD Kota Palembang.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka harapannya skripsi ini dapat membantu dan menjadi referensi bagi semuanya untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Menyadari betapa pentingnya implementasi retribusi jasa angkutan laut, sungai dan penyebrangan maka penulis tertarik untuk memilih judul **“Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Jasa Angkutan Laut, Sungai dan Penyebrangan di Dinas Perhubungan Kota Palembang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, untuk itu permasalahan yang dapat diambil ialah “Bagaimana Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Angkutan Laut, Sungai dan Penyebrangan di Dinas Perhubungan Kota Palembang ?”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, untuk itu tujuan ialah untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Angkutan Laut, Sungai dan Penyebrangan di Dinas Perhubungan Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan permasalahan di atas, hasil ini harapannya dapat membantu dan memberi wawasan untuk ilmu administrasi negara, terutama konsentrasi kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

Berdasarkan permasalahan di atas, hasil ini harapannya memberikan sumbangan saran untuk masyarakat khususnya Dinas Perhubungan Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alamsyah, Kamal. 2016. *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Media Citra Mandiri Press
- Badjuri, Abdul Kahar dan Yuwono, Teguh. *Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi*. JLP UNDIP, Semarang, 2002.
- Conny R. Semiawan. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta:Grasindo.
- Dunn, William. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, 1998.
- Islamy, Irfan. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
- Nugroho D, Riant. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2005.
- Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008.
- Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008.
- Sutopo, H.B. *Metode Penelitian Kualitatif*. Universitas Sebelas Maret Press, Surakarta, 2008.
- Suwitri, Sri. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Wibowo, Samudra. *Evaluasi Kebijakan Publik*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. PT. Buku Kita, Jakarta, 2008

Jurnal:

- Adelin, C., & Pudehokang, E. (2011). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pen- gelolaan Retribusi Parkir di Kota Manado (Suatu Studi pada Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Manado)*.
- Chasanah, L., & Muchsin, S. (2020). *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Parkir Di Kota Batu (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Batu) Jurusan Administrasi Negara , Fakultas Ilmu Admiministrasi , Universitas Islam Malang , Jl . MT Haryono 193 Malang. 14(3), 96–100.*
- E. Sopbaba, S., Rusmiwari, S., & Hardianto, W. (2012). *Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Terhadap Pad*. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi*, 1(2), 42388.
- Lestari, N. N., Sundarso, S.(2015). *Implementasi Jasa Umum di Kabupaten Wonogiri (Kasus Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi)*. *Journal of Public Policy. Sciences*, H. (2016). *Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan. 4(1), 1–23.*

Dokumen Pemerintah:

- Pemerintah Kota Palembang Dinas Perhubungan. 2021. *Dishub Dalam Angka 2020*. Kementrian Perhubungan Republik Indonesia, Palembang.

Pemerintah Kota Palembang Dinas Perhubungan. 2021. *Laporan Kinerja Tahun 2020*.
Kementrian Perhubungan Republik Indonesia, Palembang.
Pemerintah Kota Palembang Dinas Perhubungan. 2021. *Profil Perhubungan 2020*.
Kementrian Perhubungan Republik Indonesia, Palembang.

Peraturan:

Peraturan Daerah Kota Palembang No.17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
Penyelenggaraan Transportasi

Rujukan Elektronik:

Bpk.go.id. 2017. “*Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 17 Tahun 2011*”
(<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/31556>) (Diakses 23 Oktober 2021 Pukul
09.30 WIB)